



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Jalan Khairil Anwar Stabat Kode Pos : 20814
Telepon/Fax : (061) – 8911376 Email : bpkad@langkatkab.go.id
Website : bpkad.langkat.go.id

Stabat, 26-2-2020

Nomor : 050- 179 /BPKAD/2020
Lampiran : 4 (Empat) berkas
Perihal : Penyampaian Dokumen Lakip OPD,
Renstra OPD, Tapkin OPD, IKU OPD,
Dan renja OPD

Kepada Yth :

Kepala BAPPEDA Kab. Langkat

di –

T e m p a t

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 050-272/BPP-LKT/2020 tanggal 04 Februari 2020 perihal Permintaan Dokumen Lakip OPD, Renstra OPD, Tapkin OPD, IKU OPD, dan Renja OPD.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, terlampir kami sampaikan Laporan Laporan Kinerja OPD Tahun 2019, IKU OPD Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan 2020 dan Renja/RKT Tahun 2019 dan 2020 dari BPKAD Kab. Langkat.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA BPKAD KABUPATEN LANGKAT



[Signature]
Drs. M. ISKANDARSYAH
NIP. 19660904 198603 1 001



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN ANGGARAN 2019**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPKAD Kabupaten Langkat tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja selama tahun 2019 sebagaimana direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019. LAKIP BPKAD Tahun 2019 ini merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang tugas yang diemban.

Capaian kinerja BPKAD Kabupaten Langkat Tahun 2019 terdiri atas 6 (enam) program yang dijabarkan dalam 41 (empat puluh satu) kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dicapai melalui :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional, dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - g. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - j. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - k. Kegiatan Penyediaan Jasa administrasi umum dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dicapai melalui :
 - a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;

- c. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - d. Kegiatan Pengadaan mebeleur dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala bangunan fasilitas umum dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dicapai melalui :
- a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - b. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dicapai melalui :
- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - b. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - c. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dicapai melalui :
- a. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - c. Kegiatan Verifikasi RKA/DPA-SKPD dan Perubahan RKA/DPPA SKPD dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dicapai melalui :
- a. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;

- b. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
- c. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
- d. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran perubahan APBD, dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
- e. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
- f. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
- g. Kegiatan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
- h. Kegiatan Peningkatan manajemen asset/barang daerah, dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
- i. Kegiatan Revaluasi/Appraisal asset/barang daerah, dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
- j. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
- k. Kegiatan Penyelesaian Kerugian Daerah, dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
- l. Kegiatan Rekonsiliasi Kas Daerah, dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
- m. Kegiatan Penyusunan laporan data gaji, dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
- n. Kegiatan Verifikasi Administrasi Pejabat Pelaksana Anggaran SKPD, dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;

Meski beberapa program secara kuantitatif telah tercapai, namun secara kualitatif masih perlu peningkatan kualitas untuk mencapai hasil yang diharapkan dari Rencana Kerja yang ditetapkan. Hal ini terlihat pada perumusan program-program kerja pada tahun mendatang perlu lebih disempurnakan lagi agar indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata dapat dicapai sesuai dengan yang diinginkan masyarakat.

Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada BPKAD Kabupaten Langkat dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kinerja di masa mendatang, sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi.

Stabat, 20-2-2020

KEPALA BPKAD KABUPATEN LANGKAT



Drs. M. ISKANDARSYAH
NIP. 19660904 198603 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
BAB I	1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
B. Sumber Daya SKPD	1
BAB II	5
A. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan	5
B. Indikator Kinerja Utama	11
C. Program dan Kegiatan	13
D. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Perjanjian Kinerja	14
E. Anggaran	17
BAB III	18
A. Pengukuran Kinerja	18
B. Capaian Kinerja	19
C. Realisasi Anggaran	20
D. Penutup	22
LAMPIRAN	
Capaian Rencana Kinerja Tahunan	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas pokok dan fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Selanjutnya dalam menyelenggarakan tugas tersebut BPKAD Kabupaten Langkat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat di pimpin oleh Kepala Badan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang yang membawahi beberapa subbagian/sub bidang yaitu :

1. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Anggaran terdiri dari:
 - a. Sub. Bidang Administrasi Anggaran
 - b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran
3. Bidang Perbendaharaan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
 - b. Sub Bidang Belanja Langsung
4. Bidang Verifikasi dan Pembukuan
 - a. Sub Bidang Verifikasi
 - b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
5. Bidang Asset daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - b. Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Mlik Daerah.

B. Sumber Daya SKPD

a. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya BPKAD Kabupaten Langkat didukung oleh sumber daya manusia aparatur per 31 Desember 2018 sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 32 (tiga puluh dua) orang tenaga kontrak, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian berdasarkan jumlah personil

No	Bidang Tugas	Eselon						Staf Pelaksana		Jumlah	
		II		III		IV		L	P	L	P
		L	P	L	P	L	P				
1	Kepala Badan	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Sekretariat	-	-	1	-	-	2	4	5	5	7
3	Bidang Anggaran	-	-	1	-	2	-	2	6	5	6
4	Bidang Perbendaharaan	-	-	1	-	1	1	8	5	10	6
5	Bidang Verifikasi dan Pembukuan	-	-	1	-	-	2	1	4	2	6
6	Bidang Asset Daerah	-	-	1	-	1	1	1	-	3	1
7	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	-	20	12	20	12
	Jumlah	1	-	5	-	4	6	36	32	46	38

Rincian berdasarkan tingkat pendidikan

No	Bidang Tugas	Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1	Kepala Badan	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretaris	-	-	-	-	1	-	1
3	Kepala Bidang	-	-	-	-	4	-	4
4	Kasubbag/Kasubbid	-	-	-	-	9	2	11
5	Staf Pelaksana	-	-	7	3	24	1	35
6	Tenaga Kontrak	-	3	14	1	14	-	32
	Jumlah	-	3	21	4	53	3	84

Rincian berdasarkan golongan ruang

No	Bidang Tugas	Golongan Ruang				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kepala Badan	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	2	2	4
4	Kasubbag/Kasubbid	-	-	10	-	10
5	Staf Pelaksana	-	6	29	1	36
6	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	32
	Jumlah	-	6	41	5	84

Rincian berdasarkan Diklat

No	Bidang Tugas	Diklat PIM			Jumlah
		II	III	IV	
1	Kepala Badan	-	1	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	2	2
4	Kasubbag/Kasubbid	-	-	2	2
5	<i>Belum mengikuti Diklat PIM</i>	1	5	8	14
6	Staf Pelaksana	-	-	-	-
	Jumlah	1	6	13	20

b. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

1. Bangunan Kantor.

Kantor BPKAD saat ini terletak pada Jalan Khairil Anwar Stabat.

2. Kendaraan Dinas

- Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 17 (tujuh belas) unit, terdiri dari :

1. Toyota kijang tahun 1996 BK 907 P
2. Toyota kijang tahun 1996 BK 948 P
3. Toyota kijang tahun 1996 BK 957 P
4. Toyota kijang tahun 1996 BK 942 P
5. Toyota kijang tahun 1997 BK 903 P
6. Isuzu/Panther tahun 1997 BK 804 P
7. Daihatsu tahun 2001 BK 960 P
8. Toyota kijang tahun 2002 BK 171 P
9. Panther tahun 2002 BK 1649 GE
10. Toyota kijang tahun 2003 BK 4 P
11. Panther tahun 2003 BK 1752 GH
12. Jaguar tahun 2003 B 8659 BS
13. Toyota kijang tahun 2006 BK 956 P
14. Toyota Kijang innova G tahun 2008 BK 277 P
15. Toyota Kijang innova E tahun 2008 BK 3 P
16. Kijang innova tahun 2011 BK 1076 P
17. Toyota Hi-lux tahun 2012 BK 8378 P
18. Toyota All New Rush tahun 2018 BK 1660 P

- Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 12 (dua belas) unit, terdiri dari :

1. Honda legenda tahun 2002 BK 6943 P
2. Yamaha tahun 2004 BK 3002 P
3. Yamaha tahun 2007 BK 2223 P
4. Yamaha tahun 2007 BK 2242 P
5. Yamaha tahun 2007 BK 2325 P
6. Yamaha tahun 2008 BK 2359 P
7. Yamaha tahun 2008 BK 2323 P
8. Yamaha tahun 2008 BK 2331 P
9. Yamaha tahun 2010 BK 2574 P
10. Yamaha tahun 2010 BK 2573 P
11. Yamaha Vega 2 RD tahun 2010 BK 2575 P
12. Yamaha Vega 2 RD tahun 2012 BK 2637 P
13. Yamaha Vega 2 RD tahun 2012 BK 2638 P

3. Fasilitas

Fasilitas lainnya berupa, meja kerja pegawai, meja komputer, kursi kerja, kursi tamu, komputer, laptop, AC serta fasilitas lainnya guna mendukung kerja pada BPKAD Kab. Langkat

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN

A. VISI

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat harus dibawa agar dapat eksis, sehingga visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan, dengan bertitik tolak pada visi Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Langkat Tahun 2014-2019.

Visi yang ditetapkan merupakan gambaran bersama mengenai masa depan dan menjadi komitmen Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat yang bertujuan untuk mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan fokus dan arah strategis yang jelas, menjadi perekat dan menyatukan gagasan yang strategis, yang memiliki orientasi terhadap masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi dan mampu menjamin kesinambungan organisasi.

Adapun Visi Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat, dirumuskan dan ditetapkan sebagai berikut :

**Terwujudnya Sistem Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
yang berkualitas berbasis teknologi informasi**

Penjelasan dari kata-kata yang terdapat dalam Visi ini adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya;
mengandung pengertian tercapainya suatu keadaan atau kondisi yang diharapkan atau diinginkan di masa depan
- b. Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan dan barang daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah yang dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
- c. Berkualitas ;
artinya pengelolaan keuangan harus bersifat akuntabel dalam artian dapat dipertanggungjawabkan secara integritas, jujur dan taat terhadap peraturan perundang-undangan, dikelola secara profesional dengan mengedepankan efisiensi dan efektifitas yang didukung oleh sistem administrasi yang tertib berdasarkan tata cara dan prosedur yang benar.
- d. Berbasis Teknologi Informasi;

bahwa pengelolaan keuangan dibangun atas dasar pengembangan teknologi dan kebebasan arus informasi dimana segala proses yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan asset daerah dilakukan secara komputerisasi dan aksesnya dapat secara langsung dilihat dan diterima oleh mereka yang membutuhkan

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Unit Kerja, sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat akan mengemukakan misi, yang merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang membawa organisasi itu ada dan bagaimana melakukannya, karena misi berarti sesuatu yang harus diemban atau, dilaksanakan oleh satuan kerja, sesuai visi yang telah ditetapkan sebelumnya, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Oleh karena itu untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka melalui suatu pembahasan dengan memperhatikan masukan-masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dan memberikan peluang untuk perubahan/perbaikan sesuai perkembangan lingkungan strategik, Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat menetapkan misi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Mengikuti perkembangan jaman yang terus menerus berkembang, perubahan-perubahan peraturan yang dilakukan maka diperlukannya SDM yang berkualitas sehingga mampu mengikuti perubahan yang terjadi, untuk itu dikirimkan aparatur dalam mengikuti bimtek-bimtek ataupun sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuannya, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah.

2. Peningkatan sistem pengendalian intern dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Seiring dengan makin berkembangnya teknologi terutama dalam IPTEK, maka hampir semua pelaksanaan pengelolaan keuangan dilakukan dengan sistem teknologi komputerisasi sehingga hasilnya dapat lebih baik dan terukur, Pemerintah Kabupaten Langkat saat ini telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan berbasis SIMDA.

3. Peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Setelah kantor baru BPKAD dibangun dan ditempati maka sarana dan prasarana yang diperlukan telah dilengkapi satu persatu guna meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan dan asset daerah, dan pengembangan teknologi yang berbasis komputerisasi, seperti penyampaian laporan keuangan berbasis akrual serta pelaksanaan SIMDA.

4. Meningkatkan koordinasi tentang pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah BPKAD selalu melakukan koordinasi dan konsultasi baik antar SKPD Provinsi maupun ke Pemerintah Pusat, hal tersebut dilakukan seperti penyampaian laporan penyerapan dana maupun realisasi anggaran ke Pemerintah Pusat.

TUJUAN DAN SASARAN

a. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ini konsisten dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat, yang secara kolektif menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi sebagaimana dimaksud maka Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat menetapkan tujuannya sebagai berikut :

No	MISI	TUJUAN
1.	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah	1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur pengelola keuangan dan asset daerah. 2. Meningkatkan fasilitas pendukung pengelolaan keuangan dan asset daerah guna mewujudkan pelayanan prima.
2.	Peningkatan sistem pengendalian intern dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah	1. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, 2. Menerapkan sistem akuntansi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah 3. Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah
3.	Peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah	1. Meningkatkan fasilitas gedung kantor guna mewujudkan pelayanan prima 2. Tersedianya perangkat sistem informasi dan teknologi guna mendukung pengelolaan keuangan dan asset daerah yang berkualitas
4.	Meningkatkan koordinasi tentang pengelolaan keuangan dan asset daerah	1. Menyamakan pemahaman tentang sistem pengelolaan keuangan dan asset daerah 2. Meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan 3. Mempercepat penyampaian perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan asset daerah

b. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai/dihasilkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	2	3	4
Misi Kesatu : Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah			
1.	Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur pengelola keuangan dan asset daerah.	Tertingkatnya sumber daya aparatur pengelolaan keuangan dan asset daerah	Jumlah aparatur pengelola keuangan dan asset daerah yang mengikuti jenjang pendidikan dan latihan formal/non formal bidang keuangan dan asset daerah
2.	Meningkatkan fasilitas pendukung pengelolaan keuangan dan asset daerah guna mewujudkan pelayanan prima.	Tersedianya sistem aplikasi SIMDA	Tersedianya sistem aplikasi SIMDA
Misi Kedua : Peningkatan sistem pengendalian intern dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah			
1.	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan,	Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat	Tersedianya dokumen LAKIP, RENJA, Laporan Keuangan BPKAD, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat yang tepat waktu
2.	Menerapkan sistem akuntansi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah berbasis akrual	Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah tepat waktu dan tercapainya opini yang baik atas laporan keuangan Pemerintah Daerah
3.	Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi
Misi Ketiga : Peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah			
1.	Meningkatkan fasilitas gedung kantor guna mewujudkan pelayanan prima	Tersedianya fasilitas gedung kantor BPKAD yang memadai	Terlaksananya pelayanan prima
2.	Tersedianya perangkat sistem informasi dan teknologi guna mendukung pengelolaan keuangan dan asset daerah yang berkualitas	Tersedianya perangkat lunak sistem informasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Teroperasionalkannya sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan dan asset yang berbasis teknologi (SIMDA)

NO	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	2	3	4
Misi Keempat : Meningkatkan koordinasi tentang pengelolaan keuangan dan asset daerah			
1.	Menyamakan pemahaman tentang sistem pengelolaan keuangan dan asset daerah	Meningkatnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah.	Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan dan asset daerah
2.	Meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan	Tertingkatnya kemampuan dalam memahami Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dan asset daerah
3.	Mempercepat penyampaian perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan asset daerah	Tercapainya penyampaian perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan asset daerah yang tepat waktu	Terciptanya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang akurat

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

a. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat.

Selanjutnya sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Langkat sebagaimana tertuang didalam RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2014-2019, maka disusun strategi pembangunan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat dengan prioritas agenda sebagai berikut :

NO	TUJUAN	STRATEGI
1	2	3
Misi Kesatu : Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah		
1.	Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur pengelola keuangan dan asset daerah	Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur pengelolaan keuangan dan asset daerah
2.	Meningkatkan fasilitas pendukung pengelolaan keuangan dan asset daerah guna mewujudkan pelayanan prima.	Menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk mewujudkan pelayanan prima
Misi Kedua : Peningkatan sistem pengendalian intern dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah		
1.	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Menerapkan sistem pengelolaan keuangan dan asset daerah yang transparan dan akuntabel
2.	Menerapkan sistem akuntansi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah	
3.	Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah	Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah

NO	TUJUAN	STRATEGI
1	2	3
Misi Ketiga : Peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah		
1.	Meningkatkan fasilitas gedung kantor guna mewujudkan pelayanan prima	Menyediakan fasilitas gedung kantor guna mewujudkan pelayanan prima
2.	Tersedianya perangkat sistem informasi dan teknologi guna mendukung pengelolaan keuangan dan asset daerah yang berkualitas	Tersedianya sumber daya aparatur yang memahami dan mengelola sistem informasi dan teknologi
Misi Keempat : Meningkatkan koordinasi tentang pengelolaan keuangan dan asset daerah		
1.	Menyamakan pemahaman tentang sistem pengelolaan keuangan dan asset daerah	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
2.	Meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan	Melakukan bimtek dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
3.	Mempercepat penyampaian perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan asset daerah	Melakukan langkah-langkah penyampaian informasi mengenai aturan tahapan percepatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan peraturan berlaku

b. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Penentuan kebijakan dapat mempertajam strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi.

Kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat dalam mendukung strategi pelaksanaannya dengan melakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance).

Kebijakan yang akan diterapkan pada Renstra sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3
Misi Kesatu : Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah		
1.	Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur pengelolaan keuangan dan asset daerah	Memfasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk aparatur pengelolaan keuangan dan asset daerah
2.	Menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk mewujudkan pelayanan prima	Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung untuk mewujudkan pelayanan prima
Misi Kedua : Peningkatan sistem pengendalian intern dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah		
1.	Menerapkan sistem pengelolaan keuangan dan asset daerah yang transparan dan akuntabel	Menyediakan sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan dan asset daerah

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3
3.	Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah	Melaksanakan asistensi dan pembahasan dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah
Misi Ketiga : Peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah		
1.	Menyediakan fasilitas gedung kantor guna mewujudkan pelayanan prima	Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan fasilitas gedung kantor
2.	Tersedianya sumber daya aparatur yang memahami dan mengelola sistem informasi dan teknologi	Memfasilitasi sumber daya aparatur untuk mengikuti bimtek, pelatihan dan sosialisasi sistem informasi dan teknologi pengelolaan keuangan dan asset daerah
Misi Keempat : Meningkatkan koordinasi tentang pengelolaan keuangan dan asset daerah		
1.	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait	Melakukan langkah-langkah koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
2.	Melakukan bimtek dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Memfasilitasi pelaksanaan bimtek dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan dan asset daerah
3.	Melakukan langkah-langkah penyampaian informasi mengenai aturan tahapan percepatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan peraturan berlaku	Menyampaikan informasi mengenai aturan tahapan percepatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan peraturan berlaku

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat yaitu :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKAD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Tahun				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur pengelola keuangan dan asset daerah	Tertingkatnya pengetahuan sumber daya aparatur pengelolaan keuangan dan asset daerah	- Pelatihan BMD menggunakan aplikasi Simda - Bimtek Permendagri No. 64 Tahun 2013 - Bimtek PPK Penyusunan Laporan Keuangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Meningkatkan fasilitas pendukung pengelolaan keuangan dan asset daerah guna mewujudkan pelayanan prima.	PNS dapat memanfaatkan fasilitas pendukung yang ada	Tersedianya aplikasi Simda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Tahun				
				2015	2016	2017	2018	2019
3	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat	Tersedianya dokumen LAKIP, RENJA, Laporan Keuangan BPKAD, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat yang tepat waktu	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Menerapkan sistem akuntansi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah tepat waktu dan tercapainya opini yang baik atas laporan keuangan Pemerintah Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Meningkatkan fasilitas gedung kantor guna mewujudkan pelayanan prima	Tersedianya fasilitas gedung kantor BPKAD yang memadai	Terlaksananya pelayanan prima	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Tersedianya perangkat sistem informasi dan teknologi guna mendukung pengelolaan keuangan dan asset daerah yang berkualitas	Tersedianya perangkat lunak sistem informasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Teroperasionalkannya sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan dan asset yang berbasis teknologi (SIMDA)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Menyamakan pemahaman tentang sistem pengelolaan keuangan dan asset daerah	Meningkatnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah	Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan dan asset daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan	Tertingkatnya kemampuan dalam memahami Peraturan Perundang-undangan	Tertingkatnya kemampuan dalam memahami Peraturan Perundang-undangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Mempercepat penyampaian perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan asset daerah	Tercapainya penyampaian perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan asset daerah yang tepat waktu	Terciptanya pengelolaan keuangan dan asset daerah berbasis akrual	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

C. PROGRAM dan KEGIATAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat tahun 2019 direncanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan
1	Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur pengelola keuangan dan asset daerah	Tertingkatnya pengetahuan sumber daya aparatur pengelolaan keuangan dan asset daerah	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Pendidikan dan Pelatihan Formal - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
2	Meningkatkan fasilitas pendukung pengelolaan keuangan dan asset daerah guna mewujudkan pelayanan prima.	PNS dapat memanfaatkan fasilitas pendukung yang ada	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - Verifikasi RKA/DPA-SKPD dan Perubahan RKA/DPPA SKPD
4	Menerapkan sistem akuntansi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - Verifikasi RKA/DPA-SKPD dan Perubahan RKA/DPPA SKPD
5	Menigkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah SKPD	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
6	Meningkatkan fasilitas gedung kantor guna mewujudkan pelayanan prima	Tersedianya fasilitas gedung kantor BPKAD yang memadai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
7	Tersedianya perangkat sistem informasi dan teknologi guna mendukung pengelolaan keuangan dan asset daerah yang berkualitas	Tersedianya perangkat lunak sistem informasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	- Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah - Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah - Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah - Rekonsiliasi Kas Daerah
8	Menyamakan pemahaman tentang	Meningkatnya koordinasi antar	Peningkatan dan Pengembangan	- Penyusunan Rancangan Peraturan

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan
	sistem pengelolaan keuangan dan asset daerah	SKPD dalam perencanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Daerah tentang APBD - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
9	Meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan	Tertingkatnya kemampuan dalam memahami Peraturan Perundang-undangan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10	Mempercepat penyampaian perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan asset daerah	Tercapainya penyampaian perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan asset daerah yang tepat waktu	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)/PERJANJIAN KINERJA

Rencana kinerja atau perjanjian kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rencana Kerja Tahunan atau perjanjian kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja akan dilaksanakan pada tahun berkenaan. Rencana Kerja Tahunan/perjanjian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah sebagai penjabaran tahunan dari sasaran, indikator kinerja dan target yang ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat yang akan dicapai melalui kegiatan tahunan sebagai berikut :

N o	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya pegetahuan pegawai	Terlaksananya pengiriman staf BPKAD untuk mengikuti pendidikan/pelatihan/dik lat/kursus/bimtek	1 tahun	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pendidikan dan pelatihan formal	530.000.000
2	Tersedianya laporan realisasi penyerapan DAK Fisik dan Dana Desa	Terlaksananya pengawasan laporan realisasi penyerapan DAK Fisik dan Dana Desa	1 Kegiatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	112.044.933
3	- Meningkatkan pengetahuan pengurus barang pengguna/pe ngurus barang pembantu di seluruh SKPD se-Kab. Langkat	- Terlaksananya Bimtek tentang pelaporan dan penatausahaan barang milik daerah	1 Kegiatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	223.398.800
4	Tersedianya	Terlaksananya	150 buku	Program Peningkatan	214.475.400

N o	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	informasi realisasi belanja SKPD	penyusunan buku laporan semester dan prognosis		Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	
5	Informasi realisasi APBD Kab. Langkat TA. 2018, meningkatnya kualitas penyajian laporan keuangan	Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun 2018, Tim Counter Part Pemkab. Langkat TA. 2019	100%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	856.728.070
6	Terpenuhinya verifikasi RKA/DPA SKPD Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA. 2019, verifikasi Perubahan RKA/DPPA SKPD TA. 2019 dan verifikasi RKA/DPA SKPD TA. 2020 Kab. Langkat	Terlaksananya verifikasi RKA/DPA SKPD Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA. 2019, verifikasi Perubahan RKA/DPPA SKPD TA. 2019 dan verifikasi RKA/DPA SKPD TA. 2020 Kab. Langkat	3 Kegiatan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Verifikasi RKA/DPA SKPD dan Perubahan RKA/DPA SKPD	433.783.410
7	Tersusunnya KUA dan PPAS APBD TA. 2020, Perda APBD TA. 2020 Kab. Langkat	Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS APBD TA. 2020, Penyusunan Perda APBD TA. 2020 Kab. Langkat	2 Kegiatan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD	705.485.089
8	Tersusunnya Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA. 2019 dan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA. 2020 Kab. Langkat	Terlaksananya Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA. 2019 dan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA. 2020 Kab. Langkat	2 Kegiatan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	210.700.333
9	Tersusunnya KUA dan PPAS P. APBD TA. 2019 dan Perda P. APBD TA. 2019 Kab. Langkat	Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS P.APD TA. 2019 dan Penyusunan Perda P.APD TA. 2019 Kab. Langkat	2 Kegiatan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	709.428.931
10	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran P.APD TA.	1 Kegiatan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	144.640.814

N o	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	P.APBD TA. 2019 Kab. Langkat	2019 Kab. Langkat		- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	
11	Informasi Realisasi APBD Kabupaten Langkat TA. 2018	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2018	100%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	413.644.037
12	Penjabaran realisasi APBD Kabupaten Langkat TA. 2018	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2018	100%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	78.019.890
13	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Laporan pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja SKPD dan Kabupaten, terlaksananya implementasi/penerapan e-asset, pengadaan server, terbentuknya jaringan online ke SKPD dan keuangan, terupdatenya data gaji PNS bulanan dan data keluarga PNS	1 Tahun	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1.021.130.890
14	Terciptanya keamanan asset Pemda dan tersedianya sertifikat tanah	Terlaksananya pengamanan asset Pemda dan terlaksananya pembuatan sertifikasi tanah	1 Tahun	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Peningkatan Manajemen Aset/barang Daerah	185.474.750
15	Tersedianya pelelangan, penghapusan dan penilaian Barang Milik Daerah	Tersedianya Panitia Pelelangan dan Penghapusan Barang Milik daerah	1 Tahun	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Revaluasi/Appraisal Aset/Barang daerah	56.716.800
16	Laporan fungsional SKPD yang berkualitas dan tepat waktu	Laporan fungsional SKPD TA. 2019, terlaksananya pelaporan barang milik daerah akhir tahun, monitoring belanja hibah dan bantuan	1 tahun	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Monitoring, evaluasi dan pelaporan	372.656.350
17	Informasi penyelesaian kerugian daerah	Laporan penyelesaian kerugian daerah	1 Kegiatan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyelesaian Kerugian daerah	266.071.680

N o	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
18	Informasi realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Buku laporan realisasi belanja	1 Kegiatan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Rekonsiliasi Kas Daerah	235.182.000
19	Tersedianya laporan data gaji per golongan/ eselon dll	Terlaksananya penyusunan laporan dan perhitungan data gaji	1 Kegiatan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyusunan Laporan Data Gaji	256.669.390
20	Terciptanya tertib administrasi SKPD se-Kab. Langkat	Tersedianya Keputusan Bupati Langkat tentang Pengguna Anggaran, Bendahara serta Pengurus Barang SKPD se-Kab. Langkat dan Keputusan Bupati Langkat tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Pengurus Barang dilingkungan Sekretariat Kab. Langkat	1 Kegiatan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Verifikasi Administrasi Pejabat Pelaksana Anggaran SKPD	11.665.321

E. ANGGARAN

Untuk mewujudkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat tahun 2019 tersebut didukung dengan anggaran sebesar Rp. 396.689.932.857,17 dengan rincian sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 15.890.600.000,- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 382.642.505.819,17 terdiri dari Pelanja Pegawai sebesar Rp. 6.227.905.000,- Belanja Hibah sebesar Rp. 19.144.150.000,- Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 12.608.844.200,- Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp. 4.088.917.935,- Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 339.662.528.796,- Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 910.159.888,17 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 14.047.427.038,-. Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.401.136.000,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 7.668.458.206,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.977.832.832,-

BAB III

PENGUKURAN KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan capaian indikator sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Langkat. Pengukuran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Kinerja.

Penetapan kinerja BPKAD Kabupaten Langkat mencakup penetapan proyeksi / target **indikator kinerja** atas program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam tahun 2019.

b. Pengumpulan Data Kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengumpulan data kinerja BPKAD Kabupaten Langkat tahun 2019 dilakukan melalui sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data kinerja yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan. Pengumpulan data kinerja dilakukan pada saat penyusunan LAKIP dengan memanfaatkan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan BPKAD Kabupaten Langkat.

c. Metode/Cara Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

d. Hasil Pengukuran Kinerja.

Pencapaian kinerja sasaran yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Langkat tahun 2019 merupakan bagian dari pencapaian tujuan dan pencapaian kinerja dari sasaran Pemerintah Kabupaten Langkat yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah khususnya dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2019 secara umum BPKAD Kabupaten Langkat telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja program utama. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja program utama yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.

B. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat tahun 2019 dengan realisasinya.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan indikator sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan : Menerapkan sistem akuntansi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah.

Sasaran : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Capaian sasaran

Indikator sasaran dari sasaran “Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku” adalah : “Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah tepat waktu dan tercapainya opini yang baik atas laporan keuangan Pemerintah Daerah”.

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah tepat waktu dan tercapainya opini yang baik atas laporan keuangan Pemerintah Daerah	100	100	100

Perbandingan realisasi indikator kinerja dari sasaran “Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku” antara tahun sebelumnya dengan tahun laporan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja				
		2018		2019		
		Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah tepat waktu dan tercapainya opini yang baik atas laporan keuangan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100

b. Realisasi Perjanjian Kinerja

Dalam mewujudkan capaian sasaran “Tersusunnya laporan pertanggungjawaban

keuangan dan asset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Dilakukan evaluasi dengan memperbandingkan antara target dan realisasi setiap kegiatan adalah sebagai berikut :

Kegiatan				Realisasi	%
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
Tersedianya LKPJ	Laporan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja SKPD dan Kabupaten serta terlaksananya implementasi/ penerapan SIMDA BMD	Tahun			

Perjanjian kinerja untuk sasaran “Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku” terdiri dari 1 program antara lain : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Serta 2 kegiatan yang capaian kinerjanya rata-rata 100%

- c. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 dari sasaran “Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku” adalah sebagai berikut :

N o	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Laporan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja SKPD dan Kabupaten serta terlaksananya implementasi/ penerapan SIMDA BMD	100	100	100

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat alokasi belanja dan realisasi belanja adalah sebagai berikut :

Selama periode Tahun Anggaran 2019, BPKAD Kabupaten Langkat menerima anggaran belanja sebesar Rp. 396.689.932.857,17 yang terdiri dari Belanja tidak Langsung sebesar Rp. 382.642.505.819,17 dan belanja langsung sebesar Rp. 14.047.427.038,-.

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 388.365.721.609,55 atau 97,90% dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	2.211.199.150.849,00	2.212.783.834.640,63	1.584.683.791,63	100,07
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	15.890.600.000,00	18.794.172.075,63	2.903.572.075,63	118,27
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	72.600.000,00	60.600.000,00	(12.000.000,00)	83,47
4.1.3	Bagi Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.420.000.000,00	6.307.629.896,00	(1.112.370.104,00)	85,01
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah	8.398.000.000,00	12.425.942.179,63	4.027.942.179,63	147,96

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	PERSENTASE (%)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.867.800.165.849,00	1.868.438.425.165,00	638.259.316,00	100,03
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.783.883.721.720,00	1.732.852.882.496,00	(51.030.839.224,00)	97,14
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	162.849.974.000,00	141.671.175.686,00	(21.178.798.314,00)	86,99
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya alam	10.502.130.000,00	8.280.320.785,00	(2.221.809.215,00)	78,84
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.229.427.123.000,00	1.229.427.123.000,00	-	100,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	381.104.494.720,00	353.474.263.025,00	(27.630.231.695,00)	92,75
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	83.916.444.129,00	135.585.542.669,00	51.669.098.540,00	161,57
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	77.959.544.415,00	122.648.076.020,00	44.688.531.605,00	157,32
4.2.3.2	Pendapatan Hibah Dana BOS	5.956.899.714,00	12.937.466.649,00	6.980.566.935,00	217,18
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	327.508.385.000,00	325.551.237.400,00	(1.957.147.600,00)	99,40
4.3.1	Pendapatan Hibah	122.062.117.000,00	120.380.437.000,00	(1.681.680.000,00)	98,62
4.3.3	Pendapatan Lainnya	205.446.268.000,00	205.170.800.400,00	(275.467.600,00)	99,87
	Jumlah	2.211.199.150.849,00	2.212.783.834.640,63	(1.584.683.791,63)	100,07
5	BELANJA	52.938.486.126,17	45.504.950.668,55	7.433.535.457,62	85,96
5.1	BELANJA OPERASI	49.050.493.406,00	42.736.606.728,55	(6.313.886.677,45)	87,13
5.1.1	Belanja Pegawai	6.815.051.000,00	5.776.447.790,57	(1.038.603.209,43)	84,76
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.482.448.206,00	8.563.156.937,98	(1.919.291.268,02)	81,69
5.1.5	Belanja Hibah	19.144.150.000,00	17.594.952.000,00	(1.549.198.000,00)	91,91
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	12.608.844.200,00	10.802.050.000,00	(1.806.794.200,00)	85,67
5.2	BELANJA MODAL	2.977.832.832,00	2.768.343.940,00	209.488.892,00	92,97
5.2.1	Belanja Modal tanah	100.000.000,00	99.440.000,00	(560.000,00)	99,44
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	2.673.832.832,00	2.469.319.940,00	(204.512.892,00)	92,35
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	200.000.000,00	199.584.000,00	(416.000,00)	99,79
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	910.159.888,17	-	910.159.888,17	-
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	910.159.888,17	-	(910.159.888,17)	-
6	TRANSFER	343.751.446.731,00	342.860.770.941,00	(890.675.790,00)	99,74
6.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	4.088.917.935,00	4.088.917.935,00	-	100,00
6.2	Transfer Bantuan Keuangan	339.662.528.796,00	338.771.853.006,00	(890.675.790,00)	99,74
	Jumlah	396.689.932.857,17	388.365.721.609,55	6.542.859.667,62	97,90
	Surplus/(Defisit)	1.814.509.217.991,83	1.824.418.113.031,08	(9.908.895.039,25)	100,55
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	129.610.314.419,37	129.610.314.419,37	-	100,00
7.1.1	Penggunaan SILPA	129.610.314.419,37	129.610.314.419,37	-	100,00
	Jumlah	129.610.314.419,37	129.610.314.419,37	-	100,00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.122.330.000,00	2.122.330.000,00	-	100,00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	100,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	122.330.000,00	122.330.000,00	-	100,00
	Jumlah	2.122.330.000,00	2.122.330.000,00	-	100,00
	Pembiayaan Neto	127.487.984.419,37	127.487.984.419,37	-	100,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	1.941.997.202.411,20	1.951.906.097.450,45	(9.908.895.039,25)	100,51

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media Akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja suatu Instansi Pemerintah di Kabupaten Langkat yang dapat juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan dalam melakukan instropeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

B. TINJAUAN KHUSUS

Capaian kinerja BPKAD Kabupaten Langkat pada Tahun 2019 melalui 41 (empat puluh satu) kegiatan berada dalam skala pencapaian kinerja rata-rata 100%.

Tinjauan umum dan tinjauan khusus sebagaimana diuraikan di atas diharapkan dapat menjadi refleksi obyektif atas kondisi kinerja BPKAD Kabupaten Langkat dan menjadi cermin sekaligus cambuk untuk bekerja lebih baik lagi dalam rangka peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Kiranya LAKIP 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Langkat. LAKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (***Operational Plan***), Rencana Kinerja (***Performance Plan***), Rencana Anggaran (***Strategic Plan***) pada masa mendatang.

CAPAIAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NO	SASARAN		RENCANA TINGKAT CAPAIAN	PROGRAM	URAIAN	KEGIATAN					KET.
	URAIAN	INDIKATOR				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN (%)	
1.	Meningkatkan efesiensi dan efektifitas pelayanan kepada SKPD	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	11 kegiatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Jumlah dana	Rp.	558.680.000,00	182.977.462,00	32,75	
						Output : Terbayarnya rekening telepon, internet, air, listrik dan retribusi sampah	bulan	12	12	100	
						- Rekening telepon	bulan	12	12	100	
					2 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	- Rekening Internet	bulan	12	12	100	
						- Rekening air kantor BPKAD	bulan	12	12	100	
						- Rekening listrik gedung kantor BPKAD	bulan	12	12	100	
					3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Retribusi sampah	bulan	12	12	100	
						- Tersedianya fasilitas kantor	%	100	100	100	
						Outcome : Tersedianya fasilitas kantor	%	100	100	100	
					4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah dana	Rp.	450.000.000,00	416.810.267,98	92,62	
						Output : Asuransi Barang milik daerah	unit	34	34	100	
						- Kendaraan roda 4	unit	28	28	100	
					5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Gedung dan bangunan	%	100	100	100	
						Outcome : Tersedianya jaminan barang milik daerah	%	100	100	100	
						Input : Jumlah dana	Rp.	30.000.000,00	18.549.720,00	61,83	
					6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	bulan	12	12	100	
						- Kendaraan roda 2	bulan	12	12	100	
						- Kendaraan roda 4	%	100	100	100	
					7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Outcome : Tersedianya Surat Izin Kendaraan Dinas/Operasional	Rp.	121.259.005,00	121.259.005,00	100,00	
						Input : Jumlah dana	Semester	2	2	100	
						Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor	%	1	1	100	
					8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Lancarnya kegiatan kantor	Rp.	83.585.031,00	83.496.000,00	99,89	
						Input : Jumlah dana	Bidang	5	5	100	
						Output : Belanja cetak dan penggandaan	%	100	100	100	
					9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Lancarnya kegiatan kantor	Rp.	28.285.250,00	18.276.000,00	64,61	
						Input : Jumlah dana	Rp.	28.285.250,00	18.276.000,00	64,61	
						Output : Tersedianya lampu/penerangan	Tahun	1	1	100	
					10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Penggantian bola lampu/instalasi kantor BPKAD	Tahun	1	-	-	
						- Penggantian bola lampu/instalasi Tribun Alun-alun dan Taman Lamtabah	%	100	100	100	
						Outcome : Terpeliharanya bangunan fasilitas umum dan gedung kantor BPKAD	%	100	100	100	
					11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input : Jumlah dana	Rp.	49.480.666,00	49.475.058,00	99,99	
						Output : Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	Tahun	1	1	100	
						Outcome : Terwujudnya kantor yang bersih dan nyaman	%	100	100	100	
					12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Jumlah dana	Rp.	31.000.000,00	-	-	
						Output : Penyediaan bahan bacaan : - Koran / majalah	Bulan	12	-	-	
						Outcome : Meningkatkan pengetahuan Pegawai BPKAD	%	80	80	100	

NO	SASARAN		RENCANA TINGKAT CAPAIAN	PROGRAM	URAIAN	KEGIATAN					KET.
	URAIAN	INDIKATOR				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN (%)	
2.	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan prima	Tersedianya sarana prasarana aparatur yang memadai	5 bidang	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Jumlah dana	Rp.	30.000.000,00	29.675.000,00	98,92	100
						Output : Penyediaan makanan dan minuman harian pegawai	Tahun	1	1	100	
						Outcome : Lancarnya rapat-rapat di BPKAD	%	100	100	100	
					10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Input : Jumlah dana	Rp.	985.000.000,00	921.959.284,00	93,60	100
						Output : Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	Tahun	1	1	100	
						Outcome : Terwujudnya koordinasi dan konsultasi guna perbaikan kinerja	%	100	100	100	
					11 Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Input : Jumlah dana	Rp.	1.163.626.000,00	956.660.000,00	82,21	100
						Output : Terbayarnya honorarium : - Pengelola keuangan - Pejabat Pengadaan barang/Jasa - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Pegawai honorer/tidak tetap - Uang lembur PNS dan belanja barang dan jasa	bulan bulan tahun bulan hari tahun %	12 12 1 12 42 1 100	12 12 1 12 42 1 100	100 100 100 100 100 100 100	
						Outcome : Lancarnya pengelola keuangan pada BPKAD	%	100	100	100	
					1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Jumlah dana	Rp.	1.850.000.000,00	1.719.400.000,00	92,94	100
						Output : Pengadaan Kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)	unit	5	5	100	
						Outcome : Tersedianya kendaraan dinas operasional	%	100	100	100	
					3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Jumlah dana	Rp.	318.850.000,00	317.834.000,00	99,68	100
						Output : Pembelian perlengkapan kantor : - canopy - lemari arsip - gorden eksklusif	kegiatan unit m2 %	2 4 100 100	1 1 1 100	50 25 1 100	
						Outcome : Tersedianya perlengkapan gedung kantor BPKAD	%	100	100	100	
					4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah dana	Rp.	353.996.332,00	302.166.000,00	85,36	100
						Output : Pembelian perlengkapan kantor : - mesin penghancur kertas - AC 1,5 PK - Dispenser - galon air mineral - komputer PC - all in one PC - UPS - IBM RAM 32 GB - memory server - scanner - printer - infocus	unit unit unit bh unit unit unit unit unit unit unit unit %	5 10 5 5 4 4 1 1 2 2 1 2 100	5 10 5 5 4 4 1 1 2 2 1 2 100	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	
						Outcome : Tersedianya perlengkapan gedung kantor BPKAD	%	100	100	100	
					5 Pengadaan Mebeleur	Input : Jumlah dana	Rp.	32.048.000,00	32.000.000,00	99,85	100
						Output : Pembelian mebeleur - kursi - meja 1 biro - kursi putar sandaran tinggi	unit unit unit buah	10 10 10 2	10 10 10 2	100 100 100 100	

NO	SASARAN		RENCANA TINGKAT CAPAIAN	PROGRAM	URAIAN	KEGIATAN					KET.
	URAIAN	INDIKATOR				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN (%)	
4.	Meningkatnya Disiplin aparatus pengelola keuangan	Tersedianya pakaian seragam BPKAD	80 Pegawai	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Fasilitas Umum	Outcome : Tersedianya peralatan kerja pegawai BPKAD	%	100	100	100	
						Input : Jumlah dana	Rp.	150.000.000,00	147.883.275,00	98,59	
						Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	bulan	12	12	100	
						Outcome : Terpeliharanya gedung BPKAD	%	100	100	100	
						Input : Jumlah dana	Rp.	276.839.866,00	170.099.275,00	61,44	
						Output : Penggantian suku cadang dan service kendaraan dinas : - Roda 4 - Roda 2	tahun tahun	1 1	1 1	100 100	
						Outcome : Terawatnya kendaraan dinas guna kelancaran transportasi pegawai	Ls	1	1	100	
						Input : Jumlah dana	Rp.	80.000.000,00	22.305.000,00	27,88	
						Output : Pemeliharaan alat-alat kantor : Komputer/laptop dan printer AC Peralatan kantor	tahun tahun tahun	1 1 1	1 1 1	100 100 100	
						Outcome : Terawatnya peralatan kantor BPKAD	%	100	100	100	
5.	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDm Pengelola keuangan	Tersedianya pakaian seragam BPKAD	86 pegawai	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Jumlah dana	Rp.	190.000.000,00	134.440.000,00	70,76	
						Output : Terpeliharanya bangunan fasilitas umum	Ls	1	1	100	
						Outcome : Terwujudnya bangunan fasilitas umum yang bersih dan nyaman	%	100	100	100	
						Input : Jumlah dana	Rp.	45.150.000,00	44.100.000,00	97,67	
						Output : Tersedianya pakaian dinas harian pegawai	Stel	80	80	100	
						Outcome : Tersedianya pakaian	%	100	100	100	
						Input : Jumlah dana	Rp.	181.710.000,00	177.225.000,00	97,53	
						Output : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	Stel	86	86	100	
						Outcome : Kesoragaman pakaian adat melayu	%	100	100	100	
						Input : Jumlah dana	Rp.	530.000.000,00	280.948.833,00	53,01	
6.	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya pakaian seragam BPKAD	3 kegiatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Output : - Terlaksananya pengiriman staf BPKAD untuk mengikuti pendidikan/pelatihan/diklat/kursus/bimtek - meningkatnya kompetensi dan pengetahuan bendahara dalam administrasi teknis pertanggungjawaban yang terstandarisasi bagi seluruh OPD dalam lingkungan yang diterapkan transaksi non tunai di Kabupaten Langkat	OK	65	65	100	
						Outcome : Meningkatnya pengetahuan pegawai, tertib administrasi pertanggungjawaban yang terstandarisasi bagi seluruh OPD dalam lingkungan yang diterapkan transaksi non tunai di Kabupaten Langkat	%	100	100	100	
						Input : Jumlah dana	Rp.	112.044.933,00	107.712.842,00	96,13	
						Output : Terlaksananya pengawasan laporan realisasi penyerapan DAK Fisik dan Dana Desa TA. 2018	kegiatan	1	1	100	
						Outcome : Tersedianya laporan realisasi penyerapan DAK Fisik dan Dana Desa TA. 2018	%	100	100	100	
						Input : Jumlah dana	Rp.	223.398.800,00	98.185.300,00	43,95	
						Output : Terlaksananya Bimtek tentang Permendagri No. 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodeifikasi Barang Milik Daerah	kegiatan	1	1	100	
						Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek e-budgetting dan e-asset	peserta	194	194	100	
						Outcome : Meningkatnya pengetahuan pengurus barang pengguna/pengurus barang pembantu di seluruh SKPD se-Kab. Langkat, peserta yang memahami penggunaan aplikasi e-budgetting dan e-asset	%	100	100	100	
						Input : Jumlah dana	Rp.	214.475.400,00	210.946.080,00	98,35	
	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat	3 kegiatan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Output : Terlaksananya penyusunan buku laporan semesteran dan prognosis	Buku	150	150	100	
						Outcome : Tersedianya informasi realisasi belanja SKPD	%	100	100	100	
	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat	3 kegiatan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Input : Jumlah dana	Rp.	856.728.070,00	593.139.364,00	69,23	
						Output : Buku laporan keuangan akhir tahun 2018, tim counter part Pemkab Langkat TA. 2019	%	100	100	100	

NO	SASARAN		RENCANA TINGKAT CAPAIAN	PROGRAM	URAIAN	KEGIATAN					KET.
	URAIAN	INDIKATOR				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN (%)	
						Outcome : Informasi realisasi APBD Kab. Langkat TA. 2018, meningkatnya penyajian laporan keuangan	%	100	100	100	
						Input : Jumlah dana	Rp.	433.783.410,00	428.493.892,00	98,78	
						Output : Terlaksananya verifikasi perubahan RKA dan DPPA-SKPD TA. 2019	SKPD	56	56	100	
						Terlaksananya verifikasi RKA dan DPA-SKPD TA. 2020	SKPD	56	56	100	
						Terlaksananya verifikasi Perubahan Perbu tentang Penjabaran APBD TA. 2019	SKPD	56	56	100	
						Outcome : Tersedianya data yang valid mengenai rincian anggaran	%	100	100	100	
6.	Tertingkatnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan penyusunan dan penggunaan APBD	Tersedianya dokumen APBD dan P.APBD yang efisien dan tepat waktu	16 kegiatan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Input : Jumlah dana	Rp.	705.485.089,00	685.041.889,00	97,10	
						Output : Penyusunan Perda APBD TA. 2020	Dokumen	1	1	100	
						Penyusunan KUA dan PPAS APBD TA. 2020	Dokumen	1	1	100	
						Outcome : Tersusunnya Perda tentang APBD	%	100	100	100	
					2 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Input : Jumlah dana	Rp.	210.700.333,00	209.300.262,00	99,34	
						Output : Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA. 2020 dan Penyusunan Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD TA. 2019	Dokumen	2	2	100	
					3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Outcome : Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	Dokumen	100	100	100	
						Input : Jumlah dana	Rp.	709.428.931,00	688.349.531,00	97,03	
					4 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Output : Penyusunan KUA dan PPAS P.APBD TA. 2019	Dokumen	1	1	100	
						Penyusunan Perda P.APBD TA. 2019	Dokumen	1	1	100	
						Outcome : Dokumen pengesahan KUA PPAS	Dokumen	1	1	100	
						Input : Jumlah dana	Rp.	144.640.814,00	144.640.814,00	100,00	
						Output : Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran P.APBD TA. 2019	Dokumen	1	1	100	
						Outcome : Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran P.APBD	Dokumen	1	1	100	
					5 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Input : Jumlah dana	Rp.	413.644.037,00	398.621.122,00	96,37	
						Output : Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2018	Dokumen	1	1	100	
					6 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Outcome : Tersedianya informasi realisasi APBD TA. 2018	Dokumen	1	1	100	
						Input : Jumlah dana	Rp.	78.019.890,00	73.541.390,00	94,26	
					7 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Output : Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2018	Dokumen	1	1	100	
						Outcome : Realisasi pelaksanaan APBD TA. 2018	Dokumen	1	1	100	
						Input : Jumlah dana	Rp.	1.021.130.890,00	798.679.646,00	78,22	
						Output : Penyusunan laporan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja SKPD	Dokumen	1	1	100	
						Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah	%	100	100	100	
					8 Peningkatan Daerah	Input : Jumlah dana	Rp.	185.474.750,00	125.016.030,00	67,40	
						Output : Sertifikasi tanah	Tahun	1	1	100	
					9 Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	Outcome : Terciptanya keamanan asset Pemda dan tersedianya sertifikat tanah	%	100	100	100	
						Input : Jumlah dana	Rp.	56.716.800,00	9.189.700,00	16,20	
					10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Output : Panitia Pelelangan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tahun	1	1	100	
						Outcome : Tersedianya dana operasional tim panitia penghapusan dan pelelangan BMD	%	100	100	100	
						Input : Jumlah dana	Rp.	372.656.350,00	364.106.350,00	97,71	
						Output : Laporan barang milik daerah, monitoring belanja hibah dan bantuan, laporan fungsional SKPD TA. 2019	Tahun	1	1	100	
						Outcome : Meningkatnya kualitas penyajian data bidang asset, penyaluran belanja hibah dan bansos dan laporan fungsional SKPD TA. 2019	%	100	100	100	

NO	SASARAN		RENCANA TINGKAT CAPAIAN	PROGRAM	URAIAN	KEGIATAN					KET.
	URAIAN	INDIKATOR				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN (%)	
					11 Penyelesaian Kerugian Daerah	Input : Jumlah dana	Rp.	266.071.680,00	154.775.941,00	58,17	
						Output : Penyusunan laporan terkait penyelesaian kerugian daerah	Dokumen	1	1	100	
						Outcome : Tersedianya laporan penyelesaian kerugian daerah	%	100	86	86	
					12 Rekonsiliasi Kas Daerah	Input : Jumlah dana	Rp.	235.182.000,00	231.437.000,00	98,41	
						Output : Tersusunya buku laporan realisasi belanja	kegiatan	1	1	100	
						Outcome : Tersedianya informasi rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah	%	100	100	100	
					13 Penyusunan Laporan Data Gaji	Input : Jumlah dana	Rp.	256.669.390,00	242.425.224,00	94,45	
						Output : Penyusunan laporan data gaji per golongan/fungsional/eselon dlli	kegiatan	1	1	100	
						Outcome : Tersedianya laporan data gaji per golongan/fungsional/eselon dlli	%	100	100	100	
					14 Verifikasi Administrasi Pelaksana Anggaran SKPD Pejabat	Input : Jumlah dana	Rp.	11.665.321,00	11.665.321,00	100,00	
						Output : Tersedianya Keputusan Bupati Langkat tentang Pengguna Anggaran, Bendahara serta Pengurus Barang SKPD se-Kab. Langkat dan Keputusan Bupati Langkat tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Pengurus Barang dilingkungan Sekretariat Kab. Langkat	kegiatan	1	1	100	
						Outcome : Tercapainya tertib administrasi SKPD se-Kab. Langkat	%	100	100	100	